

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di zaman sekarang yaitu era reformasi isu tentang pemberian pelayanan publik semakin menjadi perdebatan. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari tingkat keberadapan manusia yang semakin maju, dimana memberikan pelayanan yang baik oleh lembaganya merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang lebih baik dan menjadikan pemerintahan yang demokratis sehingga rakyat lebih bangga terhadap pemerintahnya. Pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel (bertanggungjawab) akan mendapat dukungan dari publik. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban seseorang maupun organisasi untuk mempertanggungjawabkan kegagalan ataupun keberhasilan pelaksanaan misi dan visi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui media yang dilakukan secara berkala.

Rembang merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pengukuran BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan) tahun 2011 terhadap kinerja SKPD Pemkab Rembang mengalami penurunan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 33% dari target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena masih banyak catatan-catatan pengelolaan keuangan daerah Rembang yang masih harus dibenahi. Namun, dari hasil pengukuran tersebut, Inspektorat menargetkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas opini BPK RI, (Lakip Kabupaten Rembang Tahun 2012). Namun pada tahun berikutnya

kinerja pada SKPD kabupaten Rembang mengalami kemajuan yang cepat dan berhasil lepas dari daerah tertinggal, ditahun berikutnya yaitu tahun 2013 secara umum tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Pemkab Rembang dapat dilaksanakan dengan baik di antaranya adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan bertambahnya sarana dan prasarana penunjang operasional peradilan (LAKIP Tahun 2013) .Pada tahun 2014 hasil pengukuran kinerja sasaran didapatkan hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 108,62% (lkjip-rembang, 2014). Pada tahun 2015 hasil pengukuran hasil pengukuran sasaran didapatkan hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 108,73%. Capaian sasaran ini meningkat tipis dibanding capaian ditahun 2014 sebesar108,62% (lkjip- rembang 2015). Hal ini memperlihatkan bahwa kinerja SKPD Pemkab Rembang mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga 2015.

Pemerintah daerah adalah pengelola dana publik yang sekiranya memperhatikan beberapa hal salah satunya adalah kejelasan sasaran anggaran. Dalam pengelolaan sumberdaya yang baik anggaran sangat di butuhkan untuk mencapai akuntabilitas kinerja yang diinginkan oleh banyak masyarakat. Kejelasan sasaran anggaran sangat dibutuhkan dan diinginkan sebagai peningkatan kualitas dan mutu pemerintah, hal tersebut akan mempermudah aparat pemerintah daerah dalam menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik.

Ada dua pendapat yang bertentangan mengenai kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja. Hidayatullah dan Herdjiono (2015) menyebutkan bahwa dengan adanya kejelasan sasaran anggaran akan memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja karena hal tersebut

dapat mempermudah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi. Hal ini didukung oleh penelitian Heptariani dkk (2013), Saputra (2014), Anjarwati (2012) yang berpendapat bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya akuntabilitas kinerja SKPD.

Namun, hasil penelitian yang berbeda telah dilakukan oleh Pangumbalerang dan Pinatik (2014) pada DPD dan BPKBMD Kota Balitung berpendapat bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan. Sehingga, baik atau tidaknya kejelasan sasaran anggaran suatu pemerintahan tidak akan mempengaruhi terjadinya akuntabilitas kinerja

Penggunaan sumber daya baik secara efisien dan efektif dapat diminimalisir dengan melakukan pengendalian akuntansi yang tepat. Dengan adanya pengendalian akuntansi yang baik memungkinkan para manager untuk dapat menyusun keputusan yang baik, mengendalikan jalannya operasi dengan efektif serta efisien dan mampu memilih alternatif yang paling baik dalam setiap masalah di suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja para pegawainya.

Ada dua pendapat yang bertentangan mengenai pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja. Hidayatullah (2015) memiliki pendapat bahwa pengendalian akuntansi menunjukkan pengaruh yang positif dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya akuntabilitas kinerja SKPD di Marauke. Namun, Anjarwati (2012) memberikan pendapat yang berbeda bahwa

pengendalian akuntansi tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah merupakan pihak yang mengatur jalannya dana publik sehingga harus mampu menyediakan informasi keuangan secara akurat. LAN dan BPKB mengungkapkan bahwa laporan dikatakan baik apabila disusun secara jujur, objektif dan transparan (terbuka untuk umum). Dengan adanya pengendalian sistem pelaporan yang memuaskan dari pemerintahan maka proses pengendalian dan pemantauan kinerja pemerintahan dalam mengalokasikan anggaran yang ditetapkan akan lebih mudah. Setiap SKPD wajib menyusun laporan keuangannya dengan baik karena laporan keuangan merupakan sumber untuk menyusun keuangan di SKPD.

Ada dua pendapat yang bertentangan mengenai sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja. Hidayatullah dan Herdjiono (2015) menyebutkan bahwa sistem pelaporan yang baik pada suatu perusahaan akan mendapatkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan (terbuka untuk umum) sehingga sistem pelaporan memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Anjarwati (2012) yang berpendapat bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD di Marauke,

Penelitian Heptariani dkk (2013), dan Saputra (2014) memiliki hasil yang berlawanan dengan penelitian Hidayatullah dan Herdjiono (2015), dan Anjarwati (2012). Heptariani dkk (2013), dan Saputra (2014) berpendapat bahwa sistem pelaporan memiliki pengaruh yang negatif dan menghasilkan pengaruh

yang tidak signifikan terhadap terjadinya akuntabilitas kinerja SKPD. Sehingga besarnya sistem pelaporan suatu pemerintahan tidak akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja yang ada.

Setiap perusahaan baik sektor pemerintahan maupun di sektor swasta, tidak hanya mengharapkan karyawan yang terampil dan cakap akan tetapi juga membutuhkan karyawan yang bekerja giat. Adanya dorongan motivasi yang tinggi akan membuat seseorang mampu berprestasi dalam bidangnya. Agar dapat memberikan/menghasilkan pekerjaan yang berkuantitas dan berkualitas maka seorang pegawai diwajibkan untuk memiliki motivasi kerja dalam dirinya tersebut yang kemudian akan berpengaruh terhadap semangat kerja mereka sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Dalam konteks pemerintah daerah setiap individu yang terlibat didalamnya harus mempunyai semangat dan motivasi kerja yang besar agar kinerjanya semakin baik.

Ada dua pendapat yang bertentangan mengenai motivasi terhadap akuntabilitas kinerja. Menurut penelitian Prisilia (2013) berpendapat bahwa motivasi kerja memberikan pengaruh positif sehingga dengan adanya motivasi kerja yang tinggi dapat meningkatkan kinerja individu yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kesejahteraan pegawai. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaya (2012) yang berpendapat bahwa motivasi kerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Namun berbeda dengan penelitian Yusuf dkk (2014) yang menyatakan bahwa motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD.

Penelitian ini melakukan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah dan Herdjiono (2015). Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah wilayah penelitian yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Rembang dan penambahan variabel independen berupa motivasi kerja. Adapun alasan ditambahkan variabel motivasi kerja karena motivasi kerja sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan semangat kerja sehingga menimbulkan akuntabilitas kinerja yang baik dan menjadi landasan dan dorongan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan lebih baik lagi. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka peneliti akan melakukan sebuah penelitian dengan judul sesuai dengan pembahasan diatas **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Motivasi Kerja terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD di Pemkab Rembang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan tanggungjawab atas kegagalan dan keberhasilan pelaksanaan misi suatu organisasi/pemerintah dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodic/berkala (Hidayatullah dan Herdjiono, 2015). Kejelasan sasaran anggaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi sektor publik untuk mengelola kekayaan organisasinya. Pengendalian akuntansi merupakan prosedur pengamanan aset dan memastikan pencaoaian tujuan pemerintah daerah yang terlihat dalam keandalan laporan keuangan di setiap akhir periode. Sistem

pelaporan merupakan kewajiban untuk melaporkan/ mengungkapkan kinerja semua aktivitas dan sumberdaya yang perlu untuk dipertanggungjawabkan. Motivasi kerja ialah sesuatu yang menjadikan landasan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan sehingga menimbulkan semangat kerja. Dengan adanya akuntabilitas kinerja yang baik maka akan menghasilkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih terbuka untuk umum dan akuntabel (bertanggungjawab) serta akan tercapainya sasaran dan tujuan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Pemkab Rembang?
2. Apakah pengendalian akuntansi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Pemkab Rembang?
3. Apakah sistem pelaporan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Pemkab Rembang?
4. Apakah motivasi kerja memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Pemkab Rembang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan masalah di atas, dapat diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Dapat menganalisis dan mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Pemkab Rembang.

2. Dapat menganalisis dan mengetahui pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Pemkab Rembang.
3. Dapat menganalisis dan mengetahui pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Pemkab Rembang.
4. Dapat menganalisis dan mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Pemkab Rembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaanyat bagi berbagai pihak sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis:

Penulis sangat berharap hasil dari penelitian yang dilakukan ini dapat menjadi wacana dalam perkembangan ilmu bidang akuntansi sektor publik. Serta penulis juga berharap semoga penerapan akuntabilitas kinerja yang lebih baik dalam dunia kerja dikemudian hari.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai wacana dalam pengambilan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD.